

## TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA BARAT (*GRANGER CAUSALITY APPROACH*)

Oleh:  
Lillyani Margaretha Orisu<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, Manokwari

### ABSTRACT

*This study focus to analysis and evaluate the causality of central government transfer fund and economic growth in the region of West Papua Province. Using secondary data from BPS, Bappeda and BKPMMD. Estimation method that used in this research is Granger Causality test. Results showed that central government transfer fund at the first time lag in the model significantly affecting economic growth, at the fourth lag there is a bilateral causality between central government transfer fund and economic growth significantly affecting each other.*

**Keywords:** *central government transfer fund, economic growth*

### PENDAHULUAN

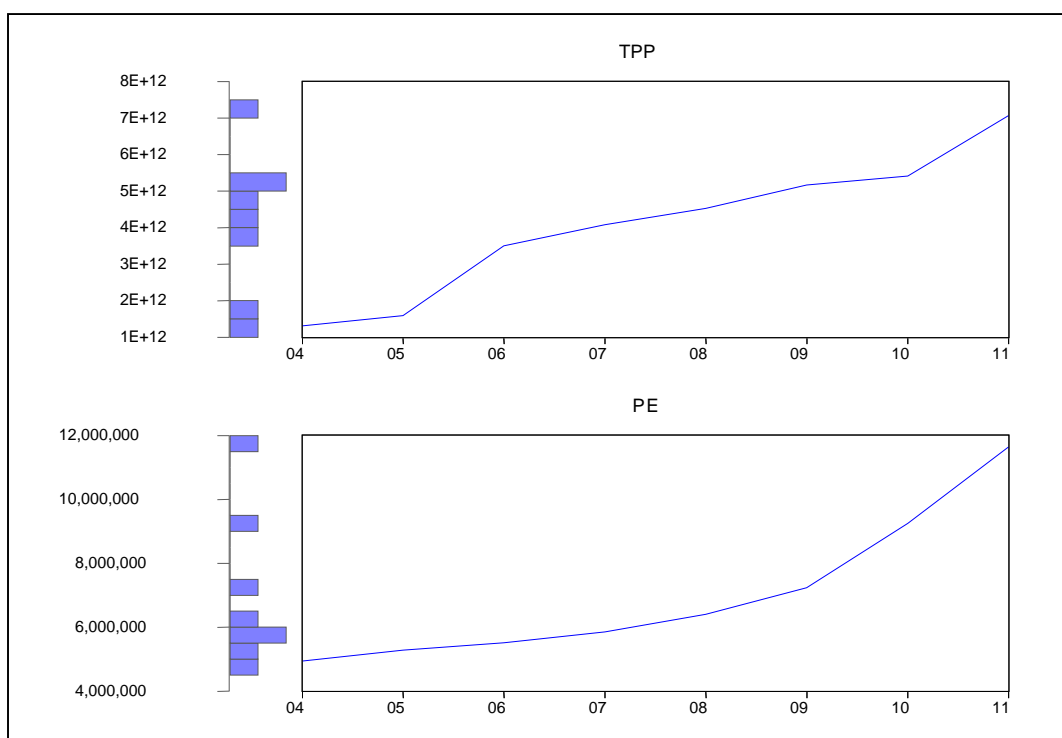
Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Wijono (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan.

Musgrave (1989) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah sebagai fasilitator pembangunan menempuh berbagai kebijakan ekonomi yang sejauh mungkin mampu menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif untuk semua pelaku ekonomi, anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal mempengaruhi mekanisme perekonomian melalui bekerjanya anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (lihat Wiralaga, 2005:2).

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Semangat perubahan paradigma tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan terbitnya

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Terbitnya undang-undang tersebut merupakan langkah yang akomodatif dan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul di daerah antara lain meliputi permasalahan kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis perekonomian daerah guna menyongsong era globalisasi ekonomi. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun arah dan kebijakan di bidang keuangan, peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Idealnya dalam kerangka otonomi daerah setiap pemerintah daerah mampu membiayai setiap kebutuhan daerahnya termasuk penyediaan fasilitas pelayanan publik dengan sumber penerimaan terbesar berasal dari pendapatan daerah termasuk dari PAD, namun yang terjadi justru sebaliknya sumber penerimaan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik tercermin dari proporsi Belanja Modal bagi kepentingan pelayanan publik terhadap total penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Papua Barat periode 2003-2011 yang dapat dilihat pada Grafik 1.



**Grafik 1. Perkembangan Transfer Pemerintah Pusat dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat**

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat terhadap transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Terlihat dari perkembangan dana transfer pemerintah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan proporsi yang besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tujuan dari dana transfer pemerintah pusat sebagai "saran edukasi" bagi pemerintah daerah belum tercapai. Sesungguhnya pemerintah diharapkan terdorong secara intensif maupun ekstensif dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaannya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. Pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi daerah dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan maka yang menjadi pertanyaan menarik untuk diteliti adalah bagaimana arah kausalitas antara dana transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana arah kausalitas antara dana transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi.

## METODE ANALISIS

### 1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *time series* dengan periode tahun 2003-2011, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda dan BKPMD Provinsi Papua Barat

### 2. Teknik Analisis Data

a. **Uji Stasioneritas Data**, uji akar unit dan derajat integrasi digunakan untuk mengetahui stasioneritas data runtun waktu. Penting untuk dilakukan karena data yang stasioner merupakan keharusan dalam model dinamis. Data runtun waktu dikatakan stasioner apabila rata-rata, varians dan kovarian tetap konstan setiap saat. Konsekuensi dari data yang tidak stasioner tersebut akan dapat mengakibatkan munculnya regresi lancung (*spurious regression*) dalam suatu model. (Insukindro, 1993; Thomas, 1997).

b. **Uji Penentuan Lag Optimal**, diinginkan menentukan lag yang cukup panjang agar menangkap sepenuhnya dinamika yang dimodelkan. Dalam praktek kita dapat membatasi jumlah lag menjadi lebih sedikit dari yang secara ideal diberikan pada model dinamis. Penentuan lag dapat menggunakan kriteria *Akaike Information Criterion (AIC)* dan *Schwarz Criterion (SIC)*. Kedua

kriteria tersebut memiliki formulasi sebagai berikut (Widarjono, 2005).

$$AIC = \log \left( \frac{\sum \hat{e}_i^2}{n} \right) + \frac{2k}{n}$$

$$SIC = \log \left( \frac{\sum \hat{e}_i^2}{n} \right) + \frac{k}{n} \log n$$

Dimana:

$\sum \hat{e}_i^2$  = residual kuadrat

k = jumlah variabel independen

n = jumlah observasi

Ketentuan panjangnya lag (kelambanan) optimal yang dipilih berdasarkan nilai AIC dan SIC yang paling minumum.

**c. Uji Kausalitas Granger**, estimasi model akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan model kausalitas Granger (*Granger Causality*). Uji kausalitas Granger penting terutama bila kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel ekonomi dalam mengidentifikasi satu variabel sebagai variabel tak bebas (Y) dan variabel lainnya sebagai variabel bebas (X), maka akan dibuat asumsi secara implisit bahwa perubahan variabel bebas akan menyebabkan perubahan variabel tak bebas. Ini adalah ide dari konsep kausalitas di mana informasi tentang X diharapkan akan mempengaruhi keadaan distribusi nilai masa datang dari Y. Penelitian mengenai hubungan sebab akibat antara variabel-variabel ekonomi dalam analisis ekonometrika.

#### d. Model Kausalitas Transfer Pemerintah Pusat (TPP) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Metode analisis dalam penelitian ini terdiri atas model *Granger Causality test* (uji kausalitas Granger) dengan model estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengetahui kausalitas transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Model uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mengestimasi hubungan kausalitas transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi digunakan dua model yaitu model 1.a (transfer pemerintah pusat sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen), dan model 1.b (pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan transfer pemerintah pusat sebagai variabel independen).

Berdasarkan hasil regresi persamaan (1.a) dan (1.b), dapat dibedakan empat kasus kausalitas yaitu (Arief, 1993):

1) Kausalitas satu arah dari LNTPP<sub>t-1</sub> ke LNPE<sub>t</sub> terjadi, jika koefisien yang diestimasi pada

nilai masa lalu transfer pemerintah pusat (LNTPP<sub>t-1</sub>) dalam persamaan (1.b) adalah signifikan secara statistik tidak sama dengan nol ( $\alpha > 0$ ), dan jika koefisien yang diestimasi pada nilai masa lalu pertumbuhan ekonomi (LNPE<sub>t-1</sub>) dalam persamaan (1.a) secara statistik sama dengan nol ( $\alpha = 0$ );

- 2) Kausalitas satu arah dari LNPE<sub>t-1</sub> ke LNTPP<sub>t-1</sub> terjadi, jika koefisien yang diestimasi pada nilai masa lalu pertumbuhan ekonomi (LNPE<sub>t-1</sub>) persamaan (1.a) adalah signifikan secara statistik tidak sama dengan nol ( $\alpha > 0$ ) dan jika koefisien nilai masa lalu transfer pemerintah pusat (LNTPP<sub>t-1</sub>) persamaan (1.b) adalah secara statistik sama dengan nol ( $\alpha = 0$ );
- 3) Kausalitas dua arah atau umpan balik (*Feedback or Bilateral Causality*), terjadi apabila koefisien masa lalu dari pertumbuhan ekonomi (LNPE<sub>t-1</sub>) dan transfer pemerintah pusat (LNTPP<sub>t-1</sub>) secara statistik tidak sama dengan nol dalam kedua regresi persamaan di atas ( $\alpha > 0, \beta > 0$ );
- 4) Tidak terdapat saling ketergantungan (*Independence*), terjadi apabila koefisien masa lalu dari pertumbuhan ekonomi (LNPE<sub>t-1</sub>) dan transfer pemerintah pusat (LNTPP<sub>t-1</sub>) secara statistik sama dengan nol dalam kedua regresi persamaan di atas ( $\alpha = 0, \beta = 0$ ).

Formulasi model sebagai berikut:

$$LNTPP_t = \alpha_0 + \alpha_1 LNTPP_{t-1} + \alpha_2 LNPE_{t-1} + \epsilon_t$$

$$LNPE_t = \beta_0 + \beta_1 LNPE_{t-1} + \beta_2 LNTPP_{t-1} + \epsilon_t$$

#### e. Uji Asumsi Klasik

Heteroskedastisitas, menunjukkan adanya kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya, dapat dideteksi dengan beberapa cara, dalam hal ini akan dilakukan uji *white*. Otokorelasi, keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan otokorelasi adalah antara lain, kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag model, tidak memasukkan variabel yang penting. Dideteksi dengan uji *Bruesch-Godfrey* atau dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (*LM Test*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Uji Stasioneritas Data

Data runtun waktu (*time series*) sering terjadi bahwa ada data yang stasioner dan yang tidak stasioner. Suatu data *time series* dikatakan stasioner apabila rata-rata varian dan covariannya

bernilai konstan pada setiap periode waktu. Data yang tidak stasioner akan mengakibatkan munculnya permasalahan berupa regresi lancung (*spurious regression*) (Thomas, 1997). Perilaku data penelitian di uji dengan menggunakan uji akar unit (*unit roots test*). Metode yang dipergunakan adalah *Augmented Dickey Fuller* (ADF), yaitu dengan membandingkan nilai absolut statistik ADF dengan nilai absolut kritisnya distribusi statistik Mackinnon pada  $\tau$  tertentu.

Hasil uji akar unit terhadap variabel transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji Stationeritas Data Pada Tingkat Level**

Variabel	ADF	1 %	5 %	10 %
LNTPP	1.054973	2.2024	1.9754	1.6120
LNPE	1.245877	3.5450	3.0714	2.8629

Keterangan:

\*\*\* signifikan 1%; \*\* signifikan 5%; \* signifikan 10%

Hasil uji stationeritas data menunjukkan bahwa variabel tidak stasioner pada bentuk level karena nilai absolut statistik ADF lebih kecil daripada nilai absolut kritisnya masing-masing pada tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10%. Untuk menstationerkan data selanjutnya dilakukan diferensi tingkat pertama (*first difference*) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2, berikut ini.

**Tabel 2. Uji Stationeritas Data Tingkat Diferensi Pertama (First Difference)**

Variabel	ADF	1 %	5 %	10 %
LNTPP	3.763104***	2.9943	2.4056	1.9762
LNPE	3.990254***	2.9642	2.3879	1.7698

Keterangan:

\*\*\* signifikan 1%; \*\* signifikan 5%; \* signifikan 10%

Hasil uji stationeritas data pada tingkat diferensi pertama menunjukkan bahwa semua variabel penelitian ternyata sudah stasioner. Hal itu dilihat dari nilai absolut statistik ADF yang lebih besar dari pada nilai absolut kritisnya, masing-masing pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%.

### b. Uji Penentuan Lag Optimal

Hasil penentuan lag optimal berdasarkan model *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Schwarz Information Criterion* (SIC) dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Penentuan Lag Optimum berdasarkan AIC dan SIC**

Model	Lag	AIC	SIC	Keterangan
1.a	1	0,94670	0,83791	Lag Optimal
1.b	5	0.73782	0.80273	Lag Optimal

### c. Hasil Estimasi Kausalitas Granger

Hasil kausalitas Granger dengan penentuan jumlah lag berdasarkan nilai *Akaike criterion* dan *Schwarz criterion* yang paling minimum sebagai dasar penentuan jumlah lag terbaik mengenai hubungan kausalitas antara transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, ditunjukkan bahwa pada model 1.a dan 1.b dalam variabel yang diteliti dengan *time lag* yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dimana terjadi hubungan kausalitas satu arah pada lag pertama, variabel transfer pemerintah pusat secara statistik signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi. Pada lag keempat terjadi hubungan kausalitas dua arah (*bilateral causality*) dimana variabel transfer pemerintah pusat dan variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan saling mempengaruhi. Kondisi ini menjelaskan terjadi pola kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) pada lag pertama dimana untuk daerah-daerah yang baru dimekarkan dana transfer pemerintah sangatlah penting untuk proses pembangunan yang intinya menggerakkan semua sektor guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki terutama untuk Provinsi Papua Barat dimana merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi kurang pada modal baik itu modal sumber daya manusia maupun sumber dana, sementara pada lag keempat terjadi hubungan kausalitas dua arah yang mengandung arti bahwa apabila dana transfer pemerintah pusat dapat memberikan dampak dalam merangsang pertumbuhan ekonomi maka dalam jangka waktu tertentu pertumbuhan ekonomi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transfer pemerintah pusat.

**Tabel 4. Hasil Estimasi Kausalitas Granger**

Time Lag	Variabel	F-statistik	Prob	Keterangan
1	LNTPP → LNPE	5.432	0.031	sig
	LNPE → LNTPP	1.887	0.135	tidak sig
4	LNTPP → LNPE	6.804	0.025	sig
	LNPE → LNTPP	5.724	0.030	sig

### d. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 sebagai berikut.

**Tabel 5. Heteroskedastisitas**

White Heteroskedasticity Test			
F-statistic	4.562479	Probability	0.095542
Obs*R-squared	11.772355	Probability	0.129440

Sumber: data diolah

**Tabel 6. Otokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.468089	Probability	0.778411
Obs*R-squared	0.882264	Probability	0.672013

Sumber: data diolah

Berdasarkan uji asumsi klasik untuk mendeteksi heteroskedastisitas dan otokorelasi digunakan uji *White* dan uji *Lagranger Multiplier* dan hasilnya menunjukkan bahwa model terbebas dari gangguan dengan angka probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ .

Sementara nilai statistik F kritis dengan *numerator* 2 dan *denominator* 8 pada  $\alpha = 5$  persen adalah 4,46. Dimana dana transfer pemerintah pusat secara signifikan mempengaruhi produk domestik regional bruto pada lag pertama dan pada lag keempat kedua variabel saling mempengaruhi secara signifikan, diperlihatkan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Uji F**

Time Lag	Variabel	F-hitung	F-tabel	Keterangan
1	LNTPP → LNPE	5.433	4.46	sig
	LNPE → LNTPP	1.887	4.46	tidak sig
4	LNTPP → LNPE	6.804	4.46	sig
	LNPE → LNTPP	5.724	4.46	sig

#### e. Analisis Ekonomi

Setelah uji kausalitas Granger, uji ekonometrik dan uji statistik pada model penelitian telah terpenuhi dan sah. Sesuai dengan tujuan penelitian maka analisis ekonomi mengenai hubungan antara investasi dan produk domestik regional bruto dapat dikemukakan sebagai berikut. Berdasarkan hasil estimasi bahwa terjadi pola kausalitas satu arah pada lag pertama dari transfer pemerintah pusat ke pertumbuhan ekonomi (*unidirectional from*  $LNTPP_{t-1}$  to  $LNPE_t$ ) dan kausalitas dua arah terjadi pada lag keempat dimana transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan adanya transfer pemerintah pusat akan meningkatkan sumber dan potensi ekonomi yang pada akhirnya dapat menaikkan output produk domestik regional bruto sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Demikian sebaliknya peningkatan output produk domestik regional bruto di daerah khususnya pada sektor-sektor yang produktif dapat memberikan rangsangan dan dorongan bagi perkembangan iklim perekonomian sehingga berpengaruh terhadap transfer pemerintah pusat dan hubungan ini terjadi dalam waktu yang bersamaan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan uji kausalitas Granger dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan kausalitas satu arah pada lag pertama dari transfer pemerintah pusat ke pertumbuhan ekonomi (*unidirectional from*  $LNTPP_t$  to  $LNPE_t$ ) dan pada lag kelima terjadi hubungan kausalitas 2 arah (*bilateral causality*) transfer pemerintah pusat dan

pertumbuhan ekonomi. Dimana berdasarkan hasil estimasi transfer pemerintah pusat lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi artinya bahwa sumber dana segar sangat cepat memacu peningkatan pemanfaatan sektor-sektor potensial secara efisien dan efektif sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi dirangsang maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kinerja perekonomian yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap transfer pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat seharusnya terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lebih optimal dan lebih berkualitas, sebagai salah satu indikator keberhasilan daerah dalam merespon adanya stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pusat melalui dana transfer pemerintah yang dialokasikan ke daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana transfer pemerintah lebih besar lagi ke pengeluaran publik agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tujuan dan sasaran transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sritua, Arief. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UI-Press. Jakarta.
- Lincoln, Arsyad. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat cetakan kedua. STIE-YKPN. Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 4* Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. Third Edition. Mc.Graw – Hill International Edition.
- Insukindro. 1993. *Penyusunan Model Ekonomi*. Pusat Antar Universitas Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Agus Widarjono. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua*. Penerbit Ekonisia. FE Ull. Yogyakarta.
- Harya Kuncara Wiralaga. 2005. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah, Pertumbuhan dan Dispartitas Pendapatan Regional Kota dan Kabupaten di Indonesia, 1988-2003*. [Disertasi]. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

